



KPU
KOTA
BIMA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

KPU KOTA BIMA
**MATAHO
MARASO**

2025

LKjIP

Laporan Kinerja
Instansi
Pemerintah

 kota-bima.kpu.go.id

 KPU Kota Bima

 @kpukotabima

 @kpu_kotabima

 KPU KOTA BIMA

 kpukotabima

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
IKHTISAR	vi
EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	3
C. TUGAS WEWENANG DAN KEWAJIBAN	3
1. Tugas Pokok	4
2. Kewenangan	4
3. Kewajiban	5
D. STRUKTUR ORGANISASI KPU KOTA BIMA	6
1. Susunan Organisasi KPU Kota Bima	7
2. Susunan Organisasi Sekretariat KPU Kota Bima	9
E. ISU STRATEGIS KPU KOTA BIMA	21
F. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA KPU KOTA BIMA	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
A. RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029	23
B. TARGET KINERJA DAN SASARAN STRATEGIS	28
C. PERJANJIAN KINERJA	45
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	49
A. Capaian Kinerja Organisasi	49
1. Ukuran Capaian Kinerja Organisasi	49
2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	52
B. REALISASI ANGGARAN	66
1. Realisasi Tahun 2025	66
2. Perbandingan Realisasi Anggaran	73
3. Analisa Keuangan	75
C. INOVASI	76
BAB IV PENUTUP	78
A. KESIMPULAN	78
B. REKOMENDASI	79
C. RENCANA TINDAK LANJUT	79
LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran	vi
Tabel 2. Komposisi Pegawai KPU Kota Bima.....	11
Tabel 3. Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan.....	11
Tabel 4. Uraian Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/ Golongan Dan Pendidikan	11
Tabel 5. Uraian Komposisi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berdasarkan Great Dan Pendidikan	13
Tabel 6. Daftar Nama Pegawai yang Mengikuti Diklat Teknis/Non Teknis	14
Tabel 7. Rencana Strategis 2025 – 2029 Target Kinerja Indikator Sasaran Strategis	25
Tabel 8. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bima Periode 2025-2029	29
Tabel 9. Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2025.....	45
Tabel 10. Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2025	46
Tabel 11. Capaian Kinerja Sekretariat KPU Kota Bima 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja.....	49
Tabel 12. Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).....	53
Tabel 13. Pengukuran Indikator Kinerja dan Target 2025	55
Tabel 14. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan	57
Tabel 15. Sarana dan Prasarana Kerja Pegawai.....	58
Tabel 16. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	63
Tabel 17. Realisasi Anggaran Tahun 2025	66
Tabel 18. Anggaran dan Realisasi Perkegiatan Tahun 2025	66
Tabel 19. Alkoasi dan realisasi Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan (6639)	67
Tabel 20. Alkoasi dan realisasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)	68
Tabel 21. Alkoasi dan realisasi Terfasilitasinya layanan operasional perkantoran (3360.EBA.994.002.0A)	68
Tabel 22. Alkoasi dan realisasi Sosialisasi Pendidikan Pemilih (3360.EBA.994.002.0B)	68
Tabel 23. Alkoasi dan realisasi Sosialisasi PAW (3360.EBA.994.002.0C)	69
Tabel 24. Alkoasi dan realisasi Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU (3360.EBA.994.002.0D)	69

Tabel 25. Alkoasi dan realisasi Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU (3360.EBA.994.002.0D)	70
Tabel 26. Alkoasi dan realisasi Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU (3360.EBA.994.002.0D)	70
Tabel 27. Alkoasi dan realisasi Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU (3360.EBA.994.002.0D)	71
Tabel 28. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran	73
Tabel 29. Rekap Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	73
Tabel 30. Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	75
Tabel 31. Pengukuran Kinerja KPU Kota Bima Tahun 2025	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi KPU Kota Bima.....	6
Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Bima.....	9
Gambar 3. Nilai SAKIP KPU Kota Bima tahun 2022, 2023, 2024	53
Gambar 4. Tangkapan Layar e-PPID KPU Kota Bima	54
Gambar 5. Tangkapan Layar Website KPU Kota Bima.....	55
Gambar 6. Hasil SKM dan Website PPID	56
Gambar 7. Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada	57
Gambar 8. Rapat Pleno TW IV PPDP Kpu Kota Bima	58
Gambar 9. Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas, Fungsi, dan Wewenang KPU Kota Bima.....	59
Gambar 10. Screenshot Website SIMARS KPU NTB.....	60
Gambar 11. Sosialisasi Kearsipan KPU Kota Bima Tahun 2025	60
Gambar 12. Tangkapan Layar Operator Sakti BMN dan SIMAN BMN	62
Gambar 13. Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas 2025.....	63
Gambar 14. Pembangunan Zona Integritas KPU Kota Bima	64
Gambar 15. Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi ASN Berprestasi	65
Gambar 16. Screenshot E – Monev Bappenas 2025	65
Gambar 17. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2011 s.d 2025, Sumber Monev Kemenkeu 2025	71
Gambar 18. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran, Sumber Monev Kemenkeu 2025	72
Gambar 19. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Sumber Monev Kemenkeu 2025	72

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Ketua KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU. Laporan ini mencakup realisasi dan pencapaian atas target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta analisis dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2025 ini, Semoga menjadi instrument penting dalam pengambilan kebijakan dan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kedepan.

Kota Bima, 29 Januari 2026
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Bima,



H. IRHAM

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kota Bima terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders.

Laporan Kinerja KPU Kota Bima Tahun 2025 tidak hanya berisi keberhasilan capaian strategis KPU Kota Bima pada Tahun Anggaran 2025 melainkan juga rekomendasi ke depan untuk menuju Pemilu/Pemilihan yang lebih berkualitas.

KPU telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 sasaran strategis dicapai dengan indikator- indikator kinerja yang terukur dan berorientasi outcome, setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, KPU Kota Bima mendapatkan Pagu Anggaran dari APBN sebesar Rp. 4,112,115,890,- (*Empat Miliar Seratus Dua Belas Juta Seratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah*) dan Hibah sebesar sebesar Rp. 1,206,126,000,- (*Satu Miliar Seratus Dua ratus enam juta seratus dua puluh enam ribu Rupiah*) dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 1,206,126,000,- (*Satu Miliar Seratus Dua ratus enam juta seratus dua puluh enam ribu Rupiah*) atau sebesar 99.99% (*Sembilan Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh SembilanPersen*). Total seluruh pagu anggaran KPU Kota Bima untuk tahun anggaran 2025 untuk APBN dan ditambah dengan Hibah adalah sebesar Rp. 5,319,568,00,- (*Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Ruapiah*).

Bila dibandingkan dengan tahun 2024 dimana KPU Kota Bima menerima pagu anggaran Rp 25,052,675,000,- (*Dua Belas Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*) Anggaran tersebut dialokasikan pada 2 (dua) program KPU sebagaimana tercantum dalam Renstra, yaitu :

Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp 21,823,806,000,-

Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 3,228,869,000,-

Tabel 1. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran

NO.	TAHUN ANGGARAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	2023	Rp. 12,584,441,000,-	Rp. 12,367,350,792,-	98.27%
2	2024	Rp. 25,052,675,000,-	Rp. 25,003,970,474,-	99.81%
3	2025	Rp. 5,319,568,000,-	Rp. 5,318,811,891,-	99.99%

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan pemilihan umum perlu suatu lembaga penyelenggara, maka dibentuklah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu dan DKPP. Dasar adanya pemilu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22E ayat (5) yaitu ”dikatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum .

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh KPU, sehubungan dengan hal tersebut KPU RI telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2025-2029 yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5

Thaun 2025 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 - 2029.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kota Bima berkewajiban melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh KPU dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU yang tercantum dalam Renstra 2025-2029.

Untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota Bima di Tahun Anggaran 2025, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Bima Tahun Anggaran 2025, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik.

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kota Bima di Tahun Anggaran 2025 mengacu pada : Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Keputusan KPU Nomor: 5/PR.03-1- Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025- 2029.

Laporan Kinerja KPU Kota Bima Tahun Anggaran 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kota Bima atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Laporan kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Bima selama Tahun Anggaran 2054, setiap capaian kinerja (performance results) Tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan PK (performance agreement) Tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kota Bima selama satu

tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja (LKjIP) KPU Kota Bima Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kota Bima atas pelaksanaan tugas dan fungsi, dan tolak ukur keberhasilan dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja serta sebagai bahan analisa untuk membuat kebijakan dan perencanaan untuk meningkatkan kinerja dimasa datang.

C. TUGAS WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Untuk itu pemahaman masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sangat diperlukan, sehingga diharapkan dapat menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang dalam pelaksanaan tugasnya menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan DPR.

Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikatakan bahwa anggota KPU berjumlah 7 orang, KPU Provinsi berjumlah 5 (lima) orang, dan KPU Kabupaten / Kota berjumlah 5 (lima) orang. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut juga menetapkan tugas dan wewenang masing- masing KPU sesuai dengan tingkatannya sebagai berikut :

Tugas Pokok Dan Wewenang Serta Kewajiban KPU Kabupaten / Kota

1. Tugas Pokok

- Tugas KPU Kabupaten / Kota sesuai pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
 - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten / Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
 - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.

2. Kewenangan

- a. Kewenangan KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
 - a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
 - b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Kabupaten / Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten / Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya ;
 - e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan

Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten / Kota, dan / atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. Kewajiban

- b. Kewajiban KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
 - a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. Memperlakukan Peserta Pemilu Secara Adil Dan Setara;
 - c. Menyampaikan Semua Informasi Penyelenggaraan Pemilu Kepada Masyarakat;
 - d. Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - e. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Semua Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota Dan Lembaga Kearsipan Kabupaten / Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - g. Mengelola Barang Inventaris KPU Kabupaten/Kota Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - h. Menyampaikan Laporan Periodik Mengenai Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Kepada KPU Dan KPU Provinsi Serta Menyampaikan Tembusannya Kepada Bawaslu;
 - i. Membuat Berita Acara Pada Setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten / Kota dan Ditandatangani Oleh Ketua Dan Anggota KPU Kabupaten / Kota;
 - j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten / Kota;
 - k. Menyampaikan Data Hasil Pemilu Dari Tiap-Tiap TPS Pada Tingkat Kabupaten/Kota Kepada Peserta Pemilu Paling Lama 7 (Tujuh) Hari Setelah Rekapitulasi Di Kabupaten/Kota;
 - l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilihan secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - m. Melaksanakan Putusan DKPP; dan
 - n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan Oleh KPU, KPU Provinsi dan / atau Peraturan Perundang-Undangan.

- o. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. STRUKTUR ORGANISASI KPU KOTA BIMA

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 236 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Periode 2024-2029. Struktur Keanggotaan KPU Kota Bima Periode 2024-2029 yaitu sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi KPU Kota Bima

1. Susunan Organisasi KPU Kota Bima

1. Tugas dan Fungsi

Tugas KPU Kota Bima berkaitan dengan kebijakan :

1.1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga

SUAEB, S.Pd.,MPd.



- a. Administrasi perkantoran, rumah tangga dan kearsipan;
- b. Protokol dan persidangan;
- c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
- d. Pelaksanaan pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan;
- e. Pengusulkan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kota Bima;
- f. Perencanaan pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu dan pemilihan.

1.2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

AMIRULMUKMININ, S.Pd., M.Pd., M.M.Inov.



- a. Sosialisasi kepemiluan;
- b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- c. Publikasi dan kkehumasan;
- d. Kampanye pemilu dan pemilihan;
- e. Kerja sama antar lembaga;
- f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- g. Rekrut anggota PPK, PPS dan KPPS;
- h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja Sumber Daya Manusia;
- i. Pendidikan dan pelatihan pengembangan SDM;
- j. Penelitian dan pengembangan kepemiluan;
- k. Pengelolaan dan pengembangan SDM, serta distribusi logistik pemilu dan pemilihan;

1.3. Divisi Perencanaan, data dan Informasi

SYAUQANY, S.Kom.I., M.A.



- a. Menjabarkan program dan anggaran;
- b. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan;
- c. Monitoring, evaluasi dan pengendalian program dan anggaran;
- d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;
- f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi;
- g. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu Nasional;

1.4. Divisi Teknis Penyelenggaraan

YETY SAFRIATI, S.Sos.



- a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- b. Verifikasi anggota partai politik dan anggota DPD;
- c. Pencalonan peserta pemilu dan pemilihan;
- d. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara;
- e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil pemilu dan pemilihan;
- f. Pelaporan dana kampanye;

1.5. Divisi Hukum dan Pengawasan

Muhaemin, S.Pd.I., S.H., M.H.



- Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kota Bima;
- Telaah hukum dan advokasi hukum;
- Dokumentasi dan publikasi hukum;
- Pengawasan dan pengendalian internal;
- Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil pemilu dan pemilihan serta non tahapan pemilu dan tahapan;
- Penanganan pelanggaran administrasi, kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota Bima, anggota KPU didukung oleh Sekretaris KPU Kota Bima. Lebih lanjut, adapun struktur organisasi sekretariat KPU Kota Bima dapat diuraikan sebagai berikut:

2. Susunan Organisasi Sekretariat KPU Kota Bima



Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Bima

- a) Tugas Sekretariat KPU Kota Bima
1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu.
 2. Memberikan dukungan teknis administratif.
 3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu.
 4. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur.
 5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota.
 7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota, dan
 8. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- b) Fungsi Sekretariat
1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kota Bima.
 2. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kota Bima.
 3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kota Bima.
 4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan Kota Bima.
 5. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kota Bima.
 6. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kota Bima.
 7. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kota Bima.
 8. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kota Bima.
 9. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kota Bima.
 10. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kota Bima.
- c) Komposisi Pegawai Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/
Pendidikan

Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bima berjumlah 32 (Tiga puluh dua) orang. Dari jumlah Pegawai tersebut, dapat dikategorisasikan menjadi 4 (Kategori) kelompok berdasarkan status kepegawaiannya dan berdasarkan tingkat pendidikannya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Komposisi Pegawai KPU Kota Bima

No	Status	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	PNS	12	41%
2	CPNS	4	13%
3	PPPK	14	44%
4	PPNPM	1	3%
TOTAL		31	100%

Tabel 3. Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	PNS	CPNS	PPPK	PPNPM
1	S – 2	1	-	-	-
2	S – 1	5	4	9	1
3	D – III	2	-	2	-
4	SMA / SMK	5	-	3	-
Total		12	4	14	1

Tabel 4. Uraian Kompisisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/ Golongan Dan Pendidikan

No.	Nama dan NIP	Jabatan	Pangkat Golongan	Pendidikan
1	H. Irham, SH. MSi	Sekretaris	Pembina Tk. I (IV/b)	S.2
2	Eka Wahyuni Dewi S., S.Sos	Kasubbag Perencanaan, Data dan Infomasi	Penata Tk. I (III/d)	S.1
3	Sri Wahyuni, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Parsispasi dan Hub Mas	Penata Tk. I (III/d)	S.1
4	Nining Agusyuni, S.Si	Kasubbag Hukum dan SDM	Penata Tk. I(III/d)	S.1

5	Amirullah, ST	Plt. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Penata, III/c	S.1
6	Awaluddin, A.Md	Penelaah Teknis Kebijakan	Penata, III/c	D.III
7	Eli Idawati, A.Md	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Penata Muda Tk. I (III/b)	D.III
8	Suryanto	Penelaah Teknis Kebijakan	Penta Muda (III/a)	SMA
9	Nurjaya	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Penta Muda (III/a)	SMA
10	Edi Kurniawan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Penta Muda (III/a)	S.1
11	Sutono	Penelaah Teknis Kebijakan	Penta Muda (III/a)	SMA
12	Nasrullah	Pengolah data dan informasi	Pengatur TK.I (II/d)	SMA
13	Muhammad Khalif Ardhi, SH	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Penta Muda (III/a)	S.1
14	Muhammad Zainul Mubarak, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Penta Muda (III/a)	S.1
15	Yudha Aditya Pratama, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Penta Muda (III/a)	S.1
16	Risky Wulan Ramadhani, SH	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Penta Muda (III/a)	S.1

Tabel 5. Uraian Komposisi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berdasarkan Great Dan Pendidikan

No.	Nama dan NIP	Jabatan	Great	Pendidikan
1	Iswati Rahmatia, S.Sos	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	IX	S.1
2	Muhammad Natsir, SH	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	IX	S.1
3	Mujiburrahman	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	IX	S.1
4	Fadlin, S.Kom	Ahli Pertama – Pranata Komputer	IX	S.1
5	Alif Adil Mukmin, SH	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	IX	S.1
6	Suhada, S.Sos	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	IX	S.1
7	Wahyu, S.Pd	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	IX	S.1
8.	Sri Melitawati, S.Pd	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	IX	S.1
9.	Ahmad Fauzan, S.Kom	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	IX	S.1
10.	Didi Darmadi, A.Md	Terampil Arsiparis	IX	S.1
11.	Ahmad Rafiuddin, A.Md	Pengelola Layanan Operasional	VII	DIII
12.	Mahyudin	Operator Layanan Operasional	V	SMA
13.	Yuyun Haryadin	Pengadministrasi Perkantoran	V	SMA
14.	Rumansyah	Pengadministrasi Perkantoran	V	SMA

d) Peningkatan Kapasitas SDM/Diklat Teknis dan Non Teknis

Berikut kami akan menyajikan daftar nama pegawai sekretariat KPU Kota Bima yang mendapat Diklat Teknis ataupun Non Teknis.

Tabel 6. Daftar Nama Pegawai yang Mengikuti Diklat Teknis/Non Teknis

N O	NAMA	JABATAN	RIWAYAT DIKLAT TEKNIS/SOSIALISASI/BIMTEK/ PKS
1	Irham	Sekretaris	Materi Disiplin Pegawai Negeri Sipil
			Training Officer Course
			Penata Kelola Pemilu
2	Eka Wahyuni Dewi S	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	E-learning Jadi Paham Gratifikasi itu Bukan Rezeki
			Berakhlak Akuntabel
			Pelatihan Sosial Kultural Jenjang 1
			Workshop Fasilitator Change Management
			Penata Kelola Pemilu
3	Sri Wahyuni	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pelatihan Program Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi
			E-Learning Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
			E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)
			Bimbingan Teknis Hukum Acara PHP Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024
			E-Learning Optimalisasi Pekerjaan Anda dengan Microsoft
			Menguasai Seni Berkomunikasi
			Penata Kelola Pemilu

4	Nining Agusyuni	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
			E-Learning Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
			E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI) untuk Umum
			Fondasi Penulisan Berita Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025
			Membangun Portofolio dan Meningkatkan Personal Branding Dengan PowerPoint
			E-Learning#JadiPaham Gratifikasi itu Bukan Rezeki
			Penata Kelola Pemilu
5	Amirullah	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	E_learning Bendahara Pengeluaran
			E-Learning Pejabat Pembuat Komitmen Angkatan III Tahun 2022
			Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Angkatan V Tahun 2025
			Pelatihan Kepemimpinan Administrator - Berpikir Kritis
			Pelatihan Struktural Kepemimpinan - Resiliensi Diri (Self Resilience)
			Pengelolaan Konflik Kepentingan
			Training Officer Course
			Penata Kelola Pemilu
6	Awaluddin	Penelaah Teknis Kebijakan	Disiplin Pegawai Negeri Sipil
			E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)
			Penata Kelola Pemilu

7	Eli Idawati	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Materi Disiplin Pegawai
			Memahami Penggunaan Microsoft Exsel untuk pengola pendataan
			E-Learning pengetahuan AntiKorupsi Dasar dan Integritas (PADI)
			Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT)
			Penata Kelola Pemilu
8	Suryanto	Penelaah Teknis Kebijakan	Training Officer Course
			Disiplin Pegawai Negeri Sipil
			Penata Kelola Pemilu
9	Nurjaya	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Training Officer Course
			Disiplin Pegawai Negeri Sipil
			Penata Kelola Pemilu
10	Edi Kurniawan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	PELATIHAN BENDAHARA
			Pelatihan Kompetensi PBJP untuk Pejabat Pengadaan
			Pelatihan PBJ Tingkat Dasar
			Pelatihan Kompetensi PPK Tipe C
			Pelatihan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Dalam PBJP
			E-Learning MKN Dasar: Pengantar Manajemen Keuangan Negara
			E-Learning MKN Dasar: Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Satuan Kerja Pemerintah Pusat
			E-Learning Pengantar Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
			E-Learning MKN Dasar: Dasar-Dasar Penyusunan APBN
			Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Pembuat Komitmen

		E-Learning Perencanaan Keuangan Satuan Kerja Pemerintah Pusat
		E-Learning Implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)
		E-Learning MKN Dasar: Dasar-Dasar Penyusunan APBN
		E-Learning Pengantar PIPK Angkatan
		E-Learning Perumusan Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output (KRO/RO)
		E-Learning Matriks Risiko Pengendalian dalam Kerangka PIPK
		E-Learning Proses Bisnis Reviu PIPK
		E-Learning Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Administrator
		E-Learning Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Bagi Pelaksana
		Open Class (AP Corner) Sharing Implementasi PIPK: Menjaga Akuntabilitas melalui Keandalan Laporan Keuangan Tahun 2023
		E-learning Pelaporan BMN
		E-Learning Penggunaan dan Pemanfaatan BMN
		E-Learning Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Negara Bagi Pengguna Barang
		E-Learning Siklus Pengelolaan BMN
		E-Learning Verifikasi Tagihan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
		Penata Kelola Pemilu

11	Sutono	Penelaah Teknis Kebijakan	Disiplin Pegawai Negeri sipil Elearning Jadi Paham Gratifikasi itu bukan rezeki Training Officer Course Penata Kelola Pemilu
12	Nasrullah	Pengelola Data dan Informasi	Training Officer Course Penata Kelola Pemilu
13	Muhamad Khalif Ardi	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Pelatihan Struktural Kepemimpinan-Resiliensi Diri Pelatihan Kepemimpinan Administrator-Berpikir Kritis E Learning #Jadi Paham Gratifikasi Itu Bukan Rezeki Pengetahuan Dasar Anti Korupsi Dan Integritas
14	Muhammad Zainul Mubarak	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Materi Disiplin Pegawai Negeri Sipil E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas Pelatihan Konsep Pemrograman Pelatihan Pengenalan Internet of Things: Konsep, Teknologi, dan Aplikasinya
15	Yudha Aditya Pratama	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Materi Disiplin Pegawai Negeri Sipil E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas
16	Risky Wulan Ramadhani	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Materi Disiplin Pegawai Negeri Sipil E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas
17	Iswati Rahmatia	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Orientasi Pegawai pemerintah Training Officer Course Materi Disiplin Pegawai Negeri

18	Muhammad Natsir	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Orientasi Pegawai pemerintah Transparansi Informasi Hasil pemilu E-LEARNING GRATIFIKASI
19	Mujiburrahman	Pranata Komputer Ahli Pertama	Orientasi Pegawai pemerintah Training Officer Course
20	Fadlin	Pranata Komputer Ahli Pertama	E-LEARNING DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI) Untuk Umum
21	Alif Adil Mukmin	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	Mengaktifkan Transformasi Digital Di Sektor Pemerintahan E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI) Untuk Umum E-learning #JadiPaham Gratifikasi itu Bukan Rezeki
22	Suhada	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	microlearning knowledge managemen Pengetahuan Anti korupsi dasar dan integritas Disiplin Pegawai Negeri Sipil
23	Wahyu	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Pengadaan Barang/Jasa Fondasi Penulisan Berita Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI) Untuk Umum E-learning #JadiPaham Gratifikasi itu Bukan Rezeki Disiplin Pegawai Negeri Sipil
24	Sri Melitawati	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Training Course Officer

25	Ahmad Fauzan	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Materi Disiplin Pegawai Negeri Sipil Training Officer Course
26	Didi Darmadi	Arsiparis Terampil	Training Course Officer Disiplin Pegawai Negeri Sipil
27	Ahmad Rafiuddin	Pengelola Layanan Operasional	Disiplin Pegawai Negeri Training Officer Course
28	Mahyudin	Operator Layanan Operasional	DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL Training Officer Course
29	Yuyun Haryadin	Pengadministrasi Perkantoran	Training Officer Course
30	Rumansyah	Pengadministrasi Perkantoran	Training Officer Course

E. ISU STRATEGIS KPU KOTA BIMA

1. Isu Strategis

Tantangan KPU Kota Bima mewujudkan konsolidasi demokrasi berdasarkan isu strategis menurut Rencana Strategis Tahun 2025-2029 antara lain adalah:

a. Akurasi dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Validitas dan kemutakhiran data pemilih menjadi isu strategis dalam menjamin hak konstitusional warga negara serta mencegah terjadinya data ganda atau pemilih tidak memenuhi syarat.

b. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Akuntabilitas Kinerja

Penurunan pagu anggaran dan tuntutan reformasi birokrasi mendorong KPU Kota Bima untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, efisiensi anggaran, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik.

2. Permasalahan

Adapun permasalahan yang dapat teridentifikasi yaitu :

- a) Pembekalan pengetahuan dan keterampilan mengenai penyelenggaraan Pemilihan/Pemilu bagi Penyelenggara ad hoc sangat kurang;
- b) Pendidikan pemilih dan sosialisasi Pemilihan/Pemilu bagi masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih sangat kurang;
- c) Norma rentang waktu bagi tahapan penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu terlalu pendek;
- d) Manajemen dan ketersediaan Sumber daya keperluan Pemilihan/Pemilu pada Satker KPU Kota Bima belum optimal;
- e) Pelembagaan dan pola koordinasi/kerjasama KPU Kota Bima dengan Pemangku Kepentingan belum sistematis

F. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA KPU KOTA BIMA

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Kota Bima Tahun 2024 sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Memuat Gambaran singkat sebagai pengantar yang berkaitan dengan Laporan Kinerja

IKHITISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja tahunan
2. Perjanjian Kinerja
3. Dokumentasi Kegiatan
4. Lain-Lain

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2025-2029, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 2025-2029.

Visi KPU Kota Bima:

Visi KPU Kota Bima menggambarkan kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui program dan kegiatan selama periode 5 tahun (2025-2029). Visi KPU Periode 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan Yang Berkualitas Dan Berintegritas Sebagai Pilar Demokrasi Substansial Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045”

Misi KPU Kota Bima:

Misi KPU Kota Bima merupakan rumusan strategis yang memandu seluruh upaya jajaran KPU dalam mewujudkan Visi. Misi KPU Periode 2025-2029 adalah:

- a. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang memenuhi asas LUBER dan JURDIL pada periode 2025-2029; dan
- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan KPU yang efektif efisien dan akuntabel pada periode 2025-2029

KPU menyusun 2 (dua) Program kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi, yakni:

1. program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
2. program Dukungan Manajemen.

Kedua Program kegiatan tersebut ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan serta membangun kelembagaan KPU yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Penetapan tujuan diperlukan untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi KPU dalam periode lima tahun. Tujuan ini berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sinergi dan kontinuitas kinerja diharapkan dapat mendorong pencapaian visi dan misi KPU secara optimal.

Tujuan KPU periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan;
- b. mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- c. mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

KPU akan dapat dinilai publik apabila mencapai tujuan yang ditetapkan, dan ini menjadi gambaran pencapaian keberhasilan KPU dalam melaksanakan Pemilu. Adapun indikator tujuan KPU yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

- a. persentase Pemilih yang Tidak Memilih pada Pemilu dan Pemilihan;
- b. persentase Penyelesaian Sengketa Tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- c. persentase satuan kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memberikan dukungan kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan secara Profesional, Akuntabel, Efektif, dan Efisien.

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7. Rencana Strategis 2025 – 2029 Target Kinerja Indikator
Sasaran Strategis

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
1. Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan							
	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Indeks Pelayanan Publik	90	95	97	99	100
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Terdata	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Partai Politik yang Berbadan Hukum yang Mendaftar dan Lolos sebagai Peserta Pemilu	0%	0%	100%	0%	0%
	Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas	Indeks Reformasi Hukum	88	90	95	98	100
		Indeks Kualitas Kebijakan	83	85	88	90	95
	Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan	Persentase Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan	0%	0%	95%	99%	100%

	Suara sesuai ketentuan yang berlaku	Suara sesuai Ketentuan yang Berlaku					
	Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel	Indeks Tata Kelola Logistik	90	95	100	100	100
	Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu dan Pemilihan	77%	78%	79%	79%	80%
3. Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien							
	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai	Indeks Reformasi Birokrasi	80	85	87	90	100
		Indeks Sistem Merit KPU	3	3	3	3	4
		Nilai SAKIP KPU	70	73	75	78	80
		Opini BPK yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Persentase Data Pemilih yang Valid dan Tidak Ganda	100%	100%	100%	100%	100%
		Indeks SPBE KPU	2	2	3	3	4
		Nilai Capaian Prioritas Nasional	99	100	100	100	100

	Indeks Perencanaan Pembangunan	92	95	97	98	100
	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	92	95	97	100
	Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU	72%	73%	75%	78%	80%
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan Baik dan Tepat Waktu	77%	79%	80%	82%	85%
	Indeks Pengelolaan Aset	3	3	3	3	3
	Tingkat Maturitas SPIP	75	77	79	80	82
	Nilai terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	87	88	89	90	91
	Tingkat Digitalisasi Arsip	60	62	65	67	70
	Indeks Tata Kelola Pengadaan	90	95	100	100	100

B. TARGET KINERJA DAN SASARAN STRATEGIS

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan Target Kinerja, yang menjadi acuan KPU Kota Bima dalam menyusun Target Kinerja satuan Kerja. Target kinerja merupakan ukuran yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Terdapat 6 Sasaran Strategis pada 3 tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis pada Tujuan 1 (Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sebagai bagian KPU yang mandiri, profesional dan berintegritas):
 - a. Tersedianya literatur peraturan perundangan bidang politik yang kuat dan penerapannya secara baik dan bertanggung jawab
 - b. Operasional system informasi Partai politik yang andal dan berkualitas
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Bima yang berkualitas
2. Sasaran Strategis pada Tujuan 2 (Menyelenggarakan Pemilu Serentak tingkat Kota Bima yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif) :
 - a. Terwujudnya peningkatan kesadaran Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi pada segmen lapisan masyarakat yang diprioritaskan di wilayah Kota Bima
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standard Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi
3. Sasaran Strategis pada Tujuan 3 (Mewujudkan Pemilu Serentak tingkat Kota Bima yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil)
Terwujudnya Pemilu Serentak tingkat Kota Bima dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

Adapun Sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bima yang akan dicapai pada periode 2025- 2029, adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bima
Periode 2025-2029

Tareget Kinerja Indikator Sasaran Program dan Kegiatan

Progra m/ Kegiata n	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikato r Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
A. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum							
	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik	Persentase Kepuasan Layanan KPU kepada Publik	90%	90%	90%	95%	98%
	Tersedianya logistik dalam penyelenggaraa n Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyediakan Logistik Pemilu dan Pemilihan secara Tepat dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya persiapan dan pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mempersiapkan dan Menyelenggaraka n Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai Tahapan	0%	0%	95%	99%	100%

		Pemilu dan Pemilihan yang Ditetapkan					
1. Pengelolaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu dan Pemilihan							
	Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melakukan Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai Ketentuan yang Berlaku dan Tepat	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mendistribusikan Logistik Pemilu dan Pemilihan dengan Tepat dan Efektif	100%	0%	0%	100%	100%
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Menyusun Laporan Logistik Pemilu dan Pemilihan dengan Baik	100%	100%	0%	100%	100%
2. Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan							

	Telaksananya penguatan Peraturan KPU sesuai dengan kaidah yang berlaku	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyajikan Informasi Produk Hukum secara Tepat, Cepat dan Akurat	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Penyuluhan Hukum dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kebijakan Regulasi KPU dengan Tanpa Sengketa Hukum	100%	100%	100%	100%	100%
3. Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih							
	Terlaksananya hubungan antar lembaga dengan baik	Jumlah Lembaga yang Terjalin Kerjasama dengan KPU dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga
	Tersedianya layanan informasi dan data kepada	Persentase Permohonan Informasi dan Data yang	100%	100%	100%	100%	100%

	publik yang cepat, akurat dan tepat	Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku					
	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%
4. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan							
	Terlaksananya tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan jadwal tahapan yang ditetapkan KPU	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Tahapan Pencalonan, Kampanye, Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai dengan Jadwal Tahapan yang Ditetapkan KPU	0%	0%	100%	100%	100%
		Jumlah Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Difasilitasi	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen

		Layanan Administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara Tepat Waktu dan sesuai Ketentuan yang Berlaku oleh KPU					
		Persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Menyusun Daerah Pemilihan (Dapil) sesuai Ketentuan yang Berlaku	0%	0%	100%	100%	0%

5. Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal

	Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal	Jumlah Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Telah Melakukan Kegiatan Pendidikan Pemilih	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
		Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih	50 orang	50 orang	100 orang	100 orang	100 orang

B. Program Dukungan Manajemen

	Terlaksananya program	Indeks Reformasi Birokrasi	80	85	87	90	100
--	-----------------------	----------------------------	----	----	----	----	-----

	reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku						
	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Tersedia Sarana dan Prasarana Kerja dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
		Nilai Capaian Indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	92	95	97	100
	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Ditetapkan KPU sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%

		Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir dan Komprehensif	95%	96%	97%	98%	99%
	Terwujudnya integrasi data dan sistem informasi Pemilu yang baik	Persentase Data dan Sistem IT yang Terintegrasi antar Unit Kerja di KPU	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pengelolaan Keuangan							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan di tingkat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase Pejabat Perbendaharaan di Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu menyelesaikan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya sistem kuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan
		Jumlah laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
		Persentase peningkatan kapasitas operator aplikasi	95%	95%	95%	95%	95%

		SAKTI modul pelaporan					
		Persentase rekap penatausahaan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	95%	95%	95%	95%	95%
	Tersusunnya formulasi kebijakan/regulasi /analisis/kajian pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah kebijakan/regulasi/a nalisis/kajian pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai secara Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%

	Mewujudkan pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan	Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan bidang pengelolaan keuangan	90%	90%	90%	90%	90%
2. Manajemen Perencanaan dan Organisasi							
	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Memadai	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Merencanakan Program dan Kegiatan sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga dalam Mendukung Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Lembaga yang Melakukan Kerjasama dengan KPU	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga
	Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Organisasi KPU	Indeks Reformasi Birokrasi	80	85	87	90	100
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melakukan Pelayanan Publik secara Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan Baik	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan

3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia							
	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan SDM	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian secara Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Layanan Pengadaan ASN secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi secara Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Proses Seleksi dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai Ketentuan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, dan Anggota KPU Kabupaten/Kota yang Pelaksanaan PAW-nya sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Dokumen Kepegawaian yang Valid dan Update	Persentase Dokumen Pegawai KPU yang Disediakan secara Valid dan Update	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Seleksi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional sesuai Ketentuan yang Berlaku	Persentase Jabatan yang Terseleksi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%

	Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terseleksi	Persentase Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
4. Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana							
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja yang Baik dan Memadai	Persentase Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana Kerja yang Baik dan Memadai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang Kantor KPU yang Dibangun atau Direnovasi dengan Tepat Waktu dan Berdaya Manfaat secara Layak dan Memadai	10%	10%	0%	0%	0%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	Persentase Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	Persentase Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	100%	100%	100%	100%	100%

Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU	Persentase Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang Memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pegawai KPU	Persentase Kualitas Layanan Pemberian Keamanan dan Ketertiban bagi Pegawai KPU	100%	100%	100%	100%	100%
Terlaksananya Fasilitasi Kesehatan bagi Pegawai KPU	Persentase Kualitas Layanan terhadap Fasilitasi Kesehatan bagi Pegawai KPU	100%	100%	100%	100%	100%

5. Pemeriksaan Internal KPU

Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal KPU	Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan di KPU yang Bersih dan Berwibawa (clean governance)	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%
Meningkatnya Hasil Pengawasan APIP KPU dalam Pelaksanaan	Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang	77%	79%	80%	82%	85%

	Tugas, Fungsi dan Wewenang KPU	Ditindaklanjuti					
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal	Nilai Maturitas SPIP	75	77	79	80	82
	Meningkatnya Kompetensi Aparat Pengawasan	Jumlah APIP yang Memiliki Sertifikasi Pengawasan Internal	50 org	50 org	100 org	100 org	100 org
6. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara							
	Terlaksananya Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemiludan Pemilihan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa KPU dengan Tanpa Ada Kasus terhadap Proses Pengadaan yang Mengakibatkan Kerugian Negara Atau Pemborosan Uang Negara	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik	100%	100%	100%	100%	100%

	Pemerintahan (SAP)	Negara yang Material					
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan

7. Pengelolaan Data dan Informasi

	Tersedianya Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	Jumlah Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyediakan Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
	Terwujudnya Penerapan e-Government secara Tepat	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Menerapkan e-Government sesuai SOP yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Sarana dan Prasarana IT KPU yang Terintegrasi dengan Baik	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyediakan Sarana dan Prasarana secara Memadai	100%	100%	100%	100%	100%

8. Pengembangan Sumber Daya Manusia							
	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Meningkatkan Kompetensi SDM melalui Media Kompetensi yang Ada	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
		Persentase Pegawai di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan Pengembangan Kompetensi dengan Jumlah Jam Pelajaran Sesuai dengan Aturan yang Berlaku dalam Periode Satu Tahun	17%	20%	25%	30%	35%
		Persentase Fungsional Penata Kelola Pemilu di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	0%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%

		yang Menyampaikan Tulisan untuk Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia					
9. Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pemilu							
	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan	Persentase Sistem Informasi Pemilu yang Dibangun dan Dikembangkan KPU dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
10. Pendataan DPT Berkelanjutan							
	Terlaksananya Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	Jumlah Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
	Terlaksananya Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	Jumlah Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pendataan DPT Berkelanjutan bersama Pihak Terkait	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja KPU Kota Bima merupakan dokumen penugasan dari Ketua KPU Kota Bima kepada Sekretaris KPU Kota Bima untuk melaksanakan Program/kegiatan, selanjutnya Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Kota Bima kepada pejabat struktural atau Kepala Sub Bagian untuk melaksanakan Kegiatan selama Tahun 2025. Adapun rincian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2025

NO	SASARAN STARTEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Prosentase Penyusunan Program, Kegiatan, dan Anggaran KPU, Pengelolaan Revisi Anggaran, Kajian/Analisa, Prosedur dan Mekanisme Penganggaran	100%
2	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025	Prosentase Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025	100%
3	Terfasilitasinya Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Prosentase Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%
		Prosentase Pemutakhiran Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) tahun 2025	100%
		Prosentase Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota	100%
		Prosentase Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	100%
		Prosentase Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDIH)	100%
		Prosentase Pelaksanaan Pengendalian Sengketa Pemilihan 2024	100%
		Prosentase Pelaksanaan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan 2024	100%
4	Terfasilitasinya Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Prosentase Evaluasi Badan Adhock Pemilihan Serentak Tahun 2024	100%

		Sosialisasi Pendidikan Pemilih Desa bebas Money Politik dan Desa Demokrasi	100%
		Prosentase Pengelolaan Media Sosial E-PPID KPU Kota Bima	100%
		Prosentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%
5	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan barang milik Negara	Persentase Layanan Gaji dan Tunjangan	100%
		Prosentase Pengelolaan Barang Milik Negara	100%
6	Meningkatnya kualitas layanan operasional perkantoran dan dukungan sarana prasarana.	Prosentase Layanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	100%
		Prosentase Pelaksanaan Administrasi dan Kearsipan	100%

KODE	PROGRAM	ANGGARAN
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.140.175.000
	Jumlah Anggaran	Rp. 3.140.175.000

Sejalan dengan penyesuaian Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima serta memperhatikan dinamika pelaksanaan tugas Sekretariat, perubahan kebijakan, dan penyesuaian program serta anggaran, Sekretariat KPU Kota Bima melakukan penyesuaian terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan ketercapaian sasaran kinerja Sekretariat secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip SAKIP.

Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2025 ditetapkan sebagai dasar pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja Sekretariat, dan disajikan pada Tabel 12 sebagai berikut:

Tabel 10. Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Layanan kepada Publik dengan Baik	Indeks Pelayanan Publik	85%
		Persentase Anggota DPRD Kota Bima yang Melaksanakan PAW	100%
2.	Meningkatnya Partisipasi Pemilih	Persentase Jumlah Partisipasi Pemilih pada Pemilu	88,30%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	dalam Pemilu dan Pilkada	Persentase Jumlah Partisipasi Pemilih pada Pilkada	84,52%
3.	Tersediannya Data Pemilih yang Valid sesuai Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Data Pemilih yang ditetapkan KPU sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%
5.	Terwujudnya Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas, Fungsi dan Wewenang KPU Kota Bima	Tersedia Sarana dan Prasarana dengan Baik serta Fasilitas Perkantoran di KPU Kota Bima	100%
6.	Pengelolaan Arsip KPU Kota Bima	Tingkat Digitalisasi Arsip	90%
7.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang Berlaku	Indeks Pengelolaan Aset	90%
8.	Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran yang Efektif dan Efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja yang Telah Ditetapkan	10 kali
9.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kota Bima	Dukungan Pencapaian Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kota Bima	100%
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90%
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Bima	BB
10.	Terlaksananya Program Reformasi Birokrasi sesuai Ketentuan yang Berlaku	Indeks Reformasi Birokrasi	85%
11.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Jumlah Pegawai yang memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Standar Kompetensi Penugasan	
		Digitalisasi Kepegawaian	100%
		Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 (3,1)
12.	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel	Pengelolaan JDIH	100%
		Persentase Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang Terdokumentasikan	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Rp. 3.661.249.000,-
2.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Rp. 1.206.126.000,-
JUMLAH		Rp. 4.867.375.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Komisi Pemilihan Umum Kota Bima selaku pengemban tugas penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kota Bima melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bima. Laporan ini memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan, baik keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada Tahun Anggaran 2025.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Perbandingan Ukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima mencantumkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis dan 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja sesuai Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun Kota Bima 2025²⁰²⁹ dan dituangkan pada Perjanjian Kinerja Ketua Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025. Adapun capaian kinerja KPU Kota Bima Tahun 2025 untuk setiap indikator dapat diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut:

Tabel 11. Capaian Kinerja Sekretariat KPU Kota Bima 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Layanan kepada Publik dengan Baik	Indeks Pelayanan Publik	100%	100%	100%
		Persentase Anggota DPRD Kota Bima yang Melaksanakan PAW	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada	Persentase Jumlah Partisipasi Pemilih pada Pemilu	95%	88,30%	88,30%
		Persentase Jumlah Partisipasi Pemilih pada Pilkada	95%	84,52%	84,52%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Tersediannya Data Pemilih yang Valid sesuai Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Data Pemilih yang ditetapkan KPU sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%
5.	Terwujudnya Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas, Fungsi dan Wewenang KPU Kota Bima	Tersedia Sarana dan Prasarana dengan Baik serta Fasilitas Perkantoran di KPU Kota Bima	100%	100%	100%
6.	Pengelolaan Arsip KPU Kota Bima	Tingkat Digitalisasi Arsip	100%	100%	100%
7.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang Berlaku	Indeks Pengelolaan Aset	100%	100%	100%
8.	Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran yang Efektif dan Efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja yang Telah Ditetapkan	10 kali	21 kali	21 kali
9.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kota Bima	Dukungan Pencapaian Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kota Bima	100%	100%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Sangat Baik (90-100%)	Sangat Baik	95,11%
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Bima	BB	BB**	BB**
10.	Terlaksananya Program Reformasi Birokrasi sesuai Ketentuan yang Berlaku	Indeks Reformasi Birokrasi	85%	100%	100%
11.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Jumlah Pegawai yang memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan	100%	100%	100%
		Digitalisasi Kepegawaian	100%	100%	100%
		Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 (3,1)	Level 3 (3,1)	Level 3 (3,1)
12.	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel	Pengelolaan JDIH	100%	100%	100%
		Persentase Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang Terdokumentasikan	100%	100%	100%

Terhadap realisasi yang belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dapat di jelaskan langkah dan tindak lanjut sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
----	-------------------	-------------------	--------	-----------	---------

1.	Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada	Persentase Jumlah Partisipasi Pemilih pada Pemilu	95%	88,30%	88,30%
		Persentase Jumlah Partisipasi Pemilih pada Pilkada	95%	84,52%	84,52%

Permasalahan:

1. Karena pada saat coklit banyak pemilih yang tidak dapat ditemui oleh pantarlih sehingga mereka tetap di daftar sebagai pemilih karena tidak ada alasan bagi pantarlih untuk mencoret pemilih tersebut.
2. Pada saat coklit bertepatan dengan musim tanam
3. Banyak pemilih yang bekerja diluar negeri tetapi masih tercatat di DPT asal.

Tindak Lanjut:

Sudah melakukan koordinasi dengan perangkat yang berada di kelurahan dan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kedepan untuk mengantisipasi hal seperti itu kami akan memasifkan tentang pentingnya partisipasi masyarakat terutama dalam pemutakhiran data pemilih, meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bawaslu dan Pemerintah Kelurahan.

2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

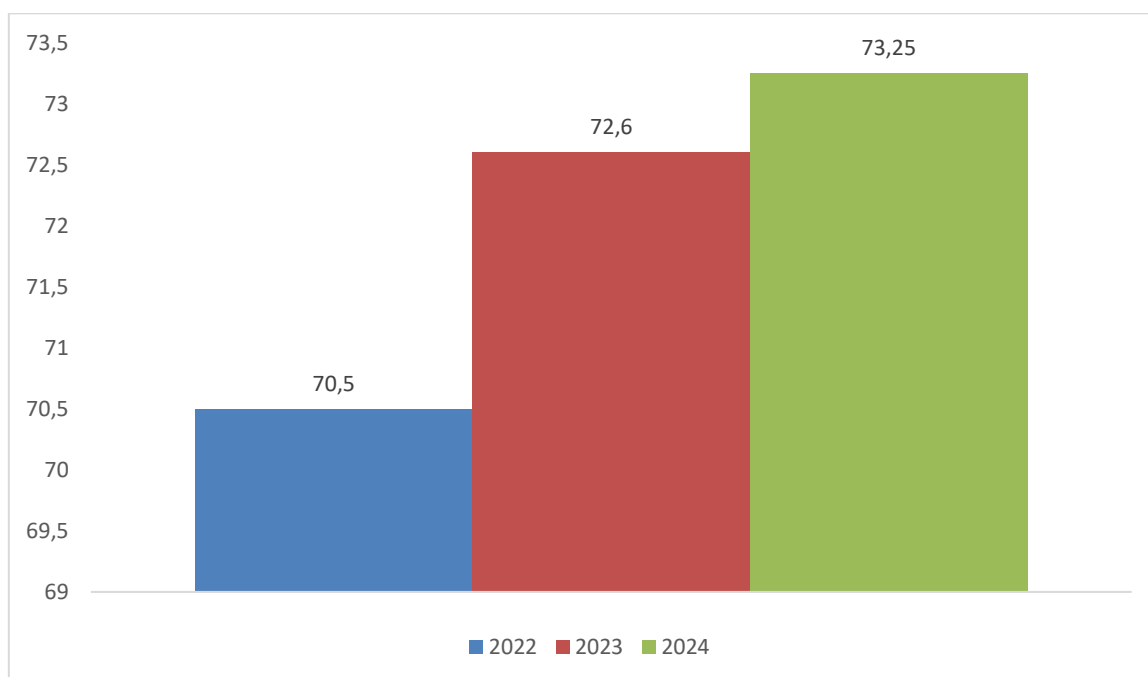
1) Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Bima

KPU Kota Bima mempertanggungjawabkan kinerjanya yang diukur melalui sasaran strategis dan indikator kinerja dengan pencapaian yang ditargetkan setiap tahunnya, dilaporkan dan dievaluasi oleh instansi di atasnya secara internal dan eksternal oleh Lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang. Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KPU Kota Bima Tahun 2023, nilai yang didapatkan 73,05 dengan predikat “BB”. Dan untuk SAKIP tahun 2025 belum dilakukan evaluasi.

Tabel 12. Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)

No.	Uraian	Bobot	Nilai		
			2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	23,10	23,1	22,20
2	Pengukuran Kinerja	30,00	19,80	22,2	22,20
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,10	10,8	9,60
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	16,50	16,5	19,25
	Nilai Hasil Evaluasi	100,00	70,50	72,6	73,25
	Kategori Akuntabilitas		BB	BB	BB

NILAI HASIL EVALUASI SAKIP KPU KOTA BIMA



Gambar 3. Nilai SAKIP KPU Kota Bima tahun 2022, 2023, 2024

Dari data diatas, setiap tahunnya Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) KPU Kota Bima mengalami peningkatan, tetapi masih

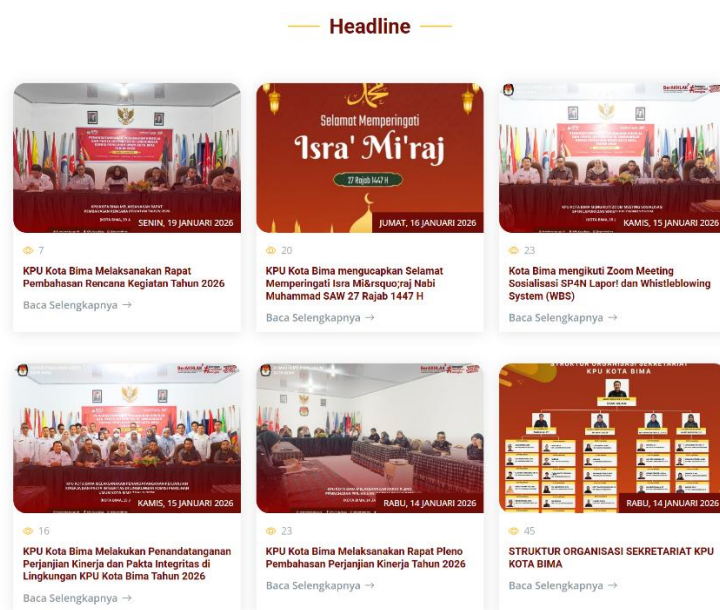
diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan Kembali nilai SAKIP di tahun yang akan datang.

Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, KPU Kota Bima membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). KPU Kota Bima menyajikan e-PPID dan website sebagai salah satu bentuk pelayanan secara online bagi pihak yang membutuhkan informasi secara cepat dan efisien. EPPID dan website KPU Kota Bima dapat diakses pada link <https://bimakotappid.kpu.go.id/> sementara untuk website KPU Kota Bima bisa diakses pada link <https://kota-bima.kpu.go.id/>



Gambar 4. Tangkapan Layar e-PPID KPU Kota Bima



Gambar 5. Tangkapan Layar Website KPU Kota Bima

Tabel 13. Pengukuran Indikator Kinerja dan Target 2025

No	Indikator Kinerja	Capaian			2025		
		2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	BB	-	-
2	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%
3	Nilai Keterbukaan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pengukuran indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis KPU Kota Bima didasarkan pada indikator outcome yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Melalui pengukuran tersebut, diperoleh gambaran rasional mengenai faktor-faktor

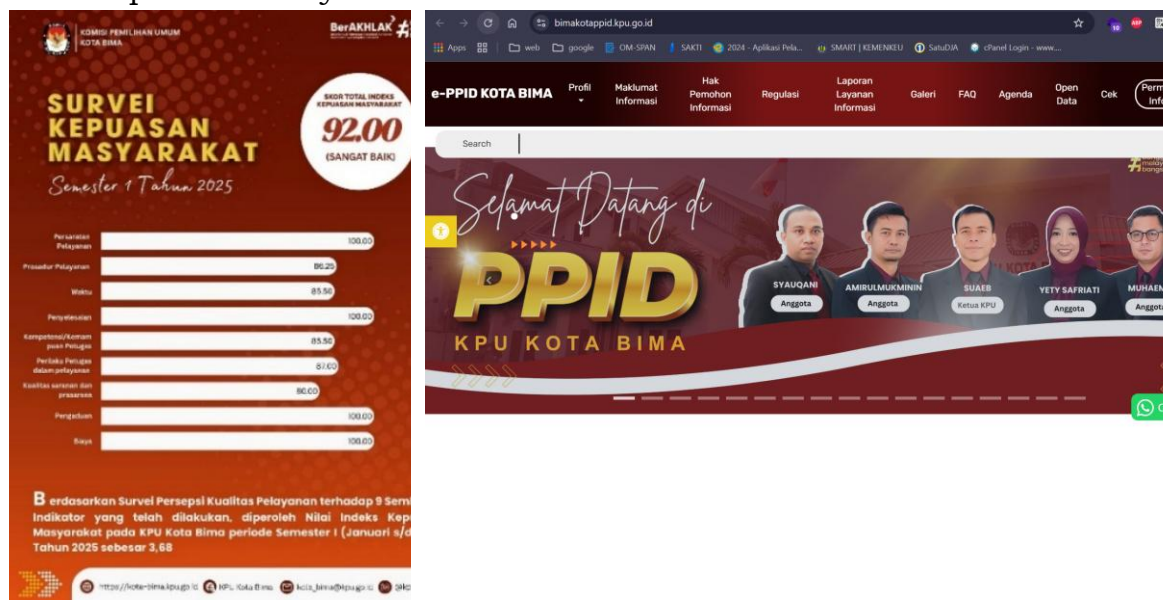
yang memengaruhi keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam mencapai target strategis sebagai perwujudan visi dan misi KPU Kota Bima.

Pencapaian sasaran strategis tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan DIPA Tahun 2025, dengan berpedoman pada indikator kinerja yang terukur. Berdasarkan capaian kinerja yang telah diuraikan pada subbagian sebelumnya, berikut disajikan analisis dan capaian kinerja KPU Kota Bima Tahun 2025 berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan.

a. Penyelenggaraan Pemilu dan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan

1. Terwujudnya Layanan kepada Publik dengan Baik

Sasaran strategis ini diarahkan untuk memastikan terpenuhinya layanan informasi dan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Sepanjang Tahun 2025, KPU Kota Bima telah melaksanakan peningkatan kualitas layanan publik melalui optimalisasi pelayanan administrasi, pemanfaatan media informasi, serta peningkatan responsivitas terhadap kebutuhan dan pengaduan masyarakat. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut, layanan publik KPU Kota Bima dapat berjalan secara efektif dan mendukung kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Berikut Nilai Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2025 :



Gambar 6. Hasil SKM dan Website PPID

2. Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada

Sasaran ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. KPU Kota Bima melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara

berkelanjutan melalui berbagai media dan metode, termasuk tatap muka dan pemanfaatan media digital. Upaya tersebut memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai pemilih, sehingga mendorong meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada.



Gambar 7. Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada

3. Tersedianya Data Pemilih yang Valid sesuai Ketentuan yang Berlaku
 Sasaran strategis ini difokuskan pada tersedianya data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan Berita Acara Nomor: 40/PK.01-BA/3/2025 Tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada tanggal 8 Desember 2025 Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menetapkan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 tingkat Kota Bima dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 14. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN				
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH LAKI-LAKI	JUMLAH PEREMPUAN	TOTAL
5	41	57,416	60,344	117.760



Gambar 8. Rapat Pleno TW IV PPDP Kpu Kota Bima

4. Terwujudnya Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas, Fungsi, dan Wewenang KPU Kota Bima

Sasaran ini bertujuan untuk mendukung kelancaran operasional organisasi melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Ketersediaan fasilitas kerja yang memadai berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan tugas dan peningkatan kinerja pegawai.

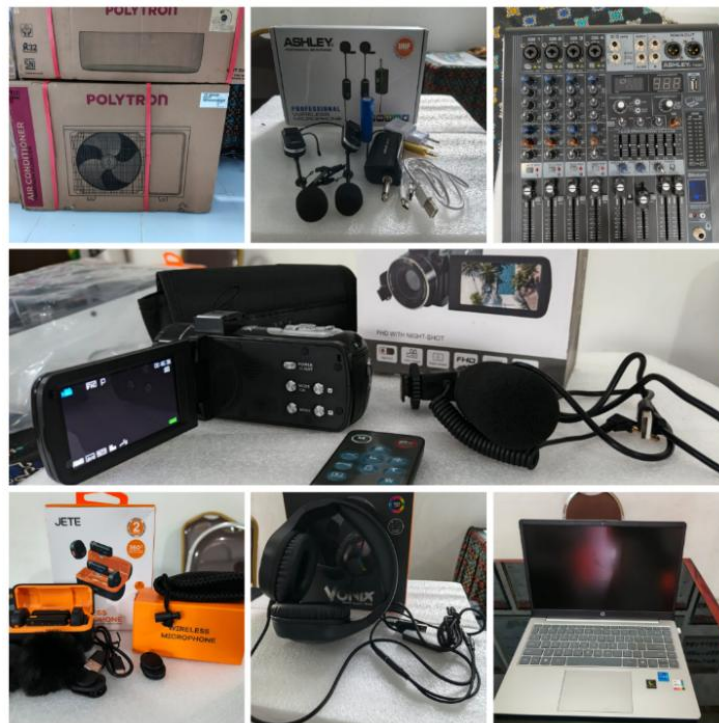
Pemenuhan sarana dan prasarana kerja ini didukung melalui pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib, meliputi inventarisasi, pemeliharaan, dan pemanfaatan aset sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan tersedianya sarana kerja yang memadai dan berfungsi dengan baik, pelaksanaan tugas pegawai dapat dilakukan secara optimal, sehingga mendukung pencapaian kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Tabel 15. Sarana dan Prasarana Kerja Pegawai

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Tanah	1	BAIK
2	Bangunan dan Gedung	3	BAIK
3	Alat angkutan bermotor	5	BAIK
4	Station Wagon (Mobil)	2	BAIK
5	Mini Bus	2	BAIK
6	PC Unit	12	BAIK
5	Laptop	20	BAIK
6	Tablet PC	6	BAIK
7	Printer	13	BAIK
8	Scanner	5	BAIK

9	Perangkat Penyimpanan Data (Harddisk)	3	BAIK
10	Peralatan Internet	7	BAIK
11	Peralatan Mainframe	1	BAIK
12	Meubelair Lainnya (meja, kursi, lemari, filing cabinet, sofa, bingkai foto, dll.)	234	BAIK
13	Peralatan Rapat dan Multimedia (LCD, sound system, mic, TV, dll.)	29	BAIK
14	Peralatan Keamanan dan Pendukung Kantor (CCTV, APAR, AC, dll.)	22	BAIK

Sumber : Sakti Operator BMN



Gambar 9. Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas, Fungsi, dan Wewenang KPU Kota Bima

5. Pengelolaan Arsip KPU Kota Bima

Pengelolaan arsip menjadi bagian penting dalam mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas kelembagaan. Sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan penataan, pendataan, dan penilaian arsip sesuai dengan kaidah kearsipan. Narasi dari sosialisasi ini semakin diperdalam oleh ibu Hety Fitriaty, narasumber dari Dinas Perpustakaan dan Arsip. Ibu Hety menjelaskan mengenai perbedaan antara arsip aktif dan inaktif, serta cara yang tepat dalam pengelolaannya. Arsip aktif adalah berkas yang masih digunakan

secara rutin dalam aktivitas sehari-hari, sedangkan arsip inaktif adalah berkas yang sudah tidak digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari namun masih perlu disimpan untuk keperluan tertentu seperti audit atau referensi di masa mendatang.

ID Arsip	Klasifikasi	Uraian Arsip	Tanggal Cipta	Aksi
000551	KU.03.1	Keputusan Sekretaris KPU Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2025 Tentang penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat KPU Provinsi NTB	02/01/2025	Detail
000552	KU.03.1	Keputusan Sekretaris KPU Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2025 Tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar pada Sekretariat KPU Provinsi NTB	02/01/2025	Detail

Gambar 10. Screenshot Website SIMARS KPU NTB



Gambar 11. Sosialisasi Kearsipan KPU Kota Bima Tahun 2025

6. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang Berlaku

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja, Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada KPU Kota Bima telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penatausahaan dan pelaporan BMN telah dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Laporan Pengelolaan BMN pada Sekretariat KPU Kota Bima mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Pedoman Penatausahaan Barang Milik Negara Kementerian/Lembaga, serta didukung oleh proses pencatatan, rekonsiliasi, dan stock opname BMN dengan memanfaatkan sistem aplikasi pengelolaan BMN.

Sejalan dengan Sasaran Strategis 4, yaitu terwujudnya dukungan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas KPU Kota Bima, Laporan Pengelolaan BMN KPU Kota Bima disusun secara lengkap dan terintegrasi, yang terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap;
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang yang Telah Diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat yang Telah Diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya;
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN);
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB);
14. Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

Dengan tersusunnya seluruh komponen Laporan Pengelolaan BMN secara lengkap dan didukung oleh informasi nilai aset yang andal, indikator kinerja Laporan Pengelolaan BMN KPU Kota Bima dinyatakan tercapai sesuai target, serta mendukung peningkatan kualitas tata kelola aset negara.

No	Nomor Tiket	Status Tiket	Jenis Pemantauan	Tahun	Tanggal Buat	Tanggal Kirim	Nama Unit	Kode Unit
1	PPM02000108400180	2.2.3 - Proses Kirim Lap Wadad Sekur	Semester 1	2025	01-06-2025	08-07-2025	KPU KOTA BIMA	0780123
2	PPM020107108400180	2.2.3 - Proses Kirim Lap Wadad Sekur	Semester 2 / Tahunan	2025	01-12-2025	15-01-2026	KPU KOTA BIMA	0780123
3	PPM041121500000000	2.2.3 - Proses Kirim Lap Wadad Sekur	Semester 2	2024	15-12-2024	29-01-2025	KPU KOTA BIMA	0780123
4	PPM041121600000000	2.2.3 - Proses Kirim Lap Wadad Sekur	Tahunan	2024	16-12-2024	29-01-2025	KPU KOTA BIMA	0780123

Gambar 12. Tangkapan Layar Operator Sakti BMN dan SIMAN BMN

7. Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran yang Efektif dan Efisien

Sasaran ini bertujuan untuk memastikan perencanaan dan penganggaran disusun secara tepat sasaran dan berorientasi pada hasil. KPU Kota Bima telah menyusun rencana kerja dan anggaran yang selaras dengan prioritas program serta kebutuhan organisasi. Perencanaan yang baik ini menjadi dasar pengendalian dan evaluasi kinerja, sekaligus menjamin penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.





Gambar 13. Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas 2025

8. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kota Bima

Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui pelaksanaan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan sesuai ketentuan, KPU Kota Bima mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran serta capaian kinerja secara jelas dan terukur.

Tabel 16. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu

Indikator Kinerja	2023		Capaian	2024		Capaian	2025		Capaian
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 kali	14 kali	100%	20 kali	18 kali	100%	20 kali	22 kali	100%

9. Terlaksananya Program Reformasi Birokrasi sesuai Ketentuan yang Berlaku

Sasaran strategis ini diarahkan untuk mendorong terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan. KPU Kota Bima telah melaksanakan program reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk penguatan tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penataan sistem kerja internal.



Gambar 14. Pembangunan Zona Integritas KPU Kota Bima

10. Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten

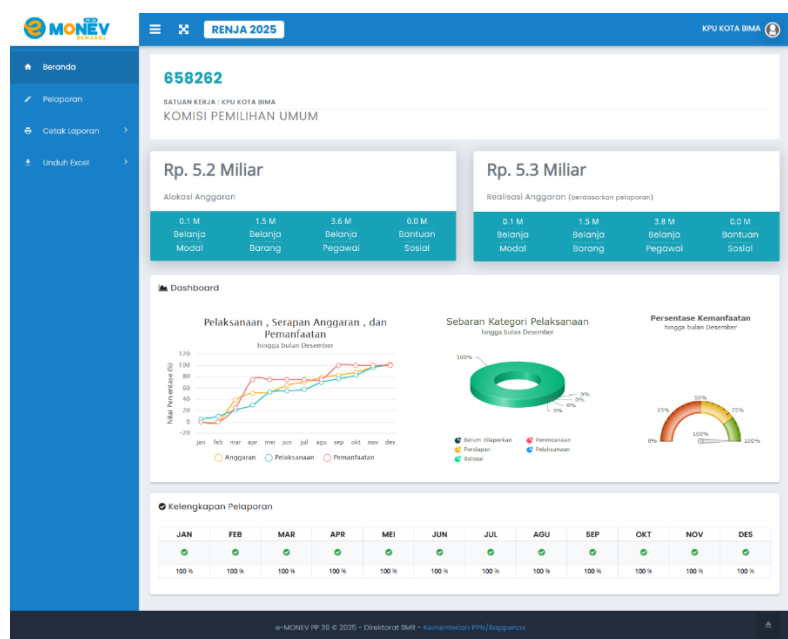
Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci keberhasilan organisasi. Melalui keikutsertaan dalam kegiatan rapat koordinasi, pembekalan, dan peningkatan kapasitas SDM, KPU Kota Bima berupaya meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Rabu, 31 Desember 2025, KPU Kota Bima Melaksanakan Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi ASN Berprestasi, yang juga diberikan kepada para Kasubbag atas kinerja dan kontribusi luar biasa di masing-masing subbagian. Kegiatan ini tidak hanya menjadi momentum apresiasi, tetapi juga dirangkaikan dengan refleksi akhir tahun sebagai upaya evaluasi dan perbaikan kinerja ke arah yang lebih baik.



Gambar 15. Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi ASN Berprestasi

11. Terwujudnya Kelembagaan KPU Kota Bima yang Bersih dan Akuntabel

Sasaran strategis ini merupakan tujuan akhir dari seluruh rangkaian program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dengan diterapkannya prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, KPU Kota Bima terus berupaya mewujudkan kelembagaan yang bersih, profesional, dan dipercaya oleh masyarakat.



Gambar 16. Screenshot E – Monev Bappenas 2025

B. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Tahun 2025

KPU Kota Bima dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Tahun 2025 melaksanakan 2 (dua) program utama yang menjadi penjabaran rencana kerja dan anggaran KPU Kota Bima dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Pemilu, pada Tahun 2025 terdapat beberapa kegiatan tahapan yang merupakan RO PN, yaitu : Penyusunan perencanaan program dan anggaran Pemilu, Penetapan Jumlah Kursi, Penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dan Penetapan Daerah Pemilihan.

Alokasi anggaran dan realisasi sampai dengan Tahun 2025 dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 17. Realisasi Anggaran Tahun 2025

No.	Program	Pagu	Realisasi	Realisasi
1	Dukungan Manajemen	4,113,442,000	2.112,117,084	99.97 %
2	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1,206,126,000	1,206,124,807	100%
Total		5,319,568,000	5,318,241,891	99.98 %

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa, pada tahun 2025 KPU Kota Bima mendapatkan Pagu Anggaran dari APBN sebesar Rp. 4,113,442,000,- (*Empat Miliar Seratus Tigabelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu*) dan Hibah sebesar sebesar Rp. 1,206,126,000,- (*Satu Miliar Dua Ratus Enam Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*) dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 5,318,241,891,- (*Lima Miliar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*) atau sebesar 99.98% (*Sembilan Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Persen*). Adapun rincian realisasi anggaran Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 18. Anggaran dan Realisasi Perkegiatan Tahun 2025

No.	Kegiatan	Target (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan (6639)	100%	Rp. 1,206,126,000	Rp. 1,206,124,807	100%	Berhasil

2.	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)	100%	Rp. 3,769,232,000	Rp. 3,767,920,978	99,97%	Berhasil
3.	Terfasilitasinya layanan operasional perkantoran (3360.EBA.994.002.0A)	100%	Rp. 213,993,000	Rp. 213,982,606	100%	Berhasil
4.	Sosialisasi Pendidikan Pemilih (3360.EBA.994.002.0B)	100%	Rp. 6,000,000	Rp. 5,999,500	99.99%	Berhasil
5.	Sosialisasi PAW (3360.EBA.994.002.0C)	100%	Rp. 9,380,000	Rp. 9,380,000	100%	Berhasil
6.	Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU (3360.EBA.994.002.0D)	100%	Rp. 20,808,000	Rp. 20,806,000	99.99%	Berhasil
7.	Pendataan DPT Berkelanjutan (3360.EBA.994.002.0E)	100%	Rp. 50,570,000	Rp. 50,570,000	100%	Berhasil
8.	Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip (3360.EBA.994.002.LC)	100%	Rp. 6,320,000	Rp. 6,319,500	99.99%	Berhasil
9.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (3360.EBB.951.A)	100%	Rp. 37,139,000	Rp. 37,138,500	100%	Berhasil

Berikut ini kami sajikan alokasi anggaran dan realisasi pelaksanaan anggaran dari masing-masing kegiatan diatas sebagai berikut:

1. Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan (6639)

Tabel 19. Alkoasi dan realisasi Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan (6639)

No.	Kegiatan	Target (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan (6639)	100%	Rp. 1,206,126,000	Rp. 1,206,124,807	100%	Berhasil

Untuk kegiatan terfasilitasinya tahapan teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sudah mencapai mencapai target 100 % masuk kategori “BERHASIL”. Jumlah pagu anggaran Rp. 1,202,126,000,- dan realisasi Rp. 1,202,124,807,- sehingga kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja Kegiatan ini ditujukan untuk mendukung tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, anggaran ini merupakan sisa dana hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024.

2. Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)

Tabel 20. Alkoasi dan realisasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)

No.	Kegiatan	Target (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
2.	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)	100%	Rp. 3,769,232,000	Rp. 3,767,920,978	99,97%	Berhasil

Kegiatan 3355 merupakan kegiatan yang memberikan orientasi pada dukungan manajemen internal seperti layanan perkantoran berupa Gaji dan Tunjangan. Dengan target kegiatan 100% terealisasi 99,97% dari total pagu yang dianggarkan Rp. 3,769,232,000,- terealisasi Rp. 3,767,920,978,- masuk dalam kategori BERHASIL. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.

3. Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360)

Tabel 21. Alkoasi dan realisasi Terfasilitasinya layanan operasional perkantoran (3360.EBA.994.002.0A)

No.	Kegiatan	Target (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
3.	Terfasilitasinya layanan operasional perkantoran (3360.EBA.994.002.0A)	100%	Rp. 213,993,000	Rp. 213,982,606	100%	Berhasil

Kegiatan Terfasilitasinya layanan operasional perkantoran (3360.EBA.994.002.0A) dilaksanakan dengan target kinerja sebesar 100%. Berdasarkan realisasi anggaran, kegiatan ini didukung oleh pagu sebesar Rp. 213.993.000,- dengan realisasi Rp. 213.982.606,-, sehingga capaian kinerja mencapai 100% dan masuk dalam kategori BERHASIL Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran operasional perkantoran KPU Kota Bima melalui penyediaan layanan administrasi serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kerja.

4. Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih (3360.EBA.994.002.0B)

Tabel 22. Alkoasi dan realisasi Sosialisasi Pendidikan Pemilih (3360.EBA.994.002.0B)

No.	Kegiatan	Target (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
4.	Sosialisasi Pendidikan Pemilih (3360.EBA.994.002.0B)	100%	Rp. 6,000,000	Rp. 5,999,500	99.99%	Berhasil

Terlaksananya kegiatan Sosialisasi pendidikan pemilih dengan target 100% terealisasi 100% dari total pagu yang dianggarkan Rp. 6,000,000,- terealisasi Rp. 5,999,500,- masuk dalam kategori BERHASIL, sehingga kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja. Anggaran ini dipergunakan untuk belanja bahan dan honorarium narasumber PodCast.

5. Kegiatan Sosialisasi Penggantian Antar Waktu (PAW) (3360.EBA.994.002.0C)

Tabel 23. Alkoasi dan realisasi Sosialisasi PAW (3360.EBA.994.002.0C)

No.	Kegiatan	Target (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
5.	Sosialisasi PAW (3360.EBA.994.002.0C)	100%	Rp. 9,380,000	Rp. 9,380,000	100%	Berhasil

Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Penggantian Antar Waktu (PAW) dengan target 100% terealisasi 100% dari total pagu yang dianggarkan Rp. 9,380,000 ,- terealisasi Rp. 9,380,000,- masuk dalam kategori BERHASIL, sehingga kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja. Anggaran ini dipergunakan untuk biaya perjalanan dinas Ke KPU Kota Bima untuk mengikuti Sosialisasi.

6. Kegiatan Rapat Koordinasi SDM KPU (3360.EBA.994.002.0D)

Tabel 24. Alkoasi dan realisasi Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU
(3360.EBA.994.002.0D)

No.	Kegiatan	Target (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
6.	Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU (3360.EBA.994.002.0D)	100%	Rp. 20,808,000	Rp. 20,806,000	99.99%	Berhasil

Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dengan target 100% terealisasi 100% dari total pagu yang dianggarkan Rp. 20,808,000- terealisasi Rp. 20,802,000,- masuk dalam kategori BERHASIL, sehingga kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja. Anggaran ini dipergunakan untuk biaya perjalanan dinas Ke KPU Kota Bima untuk mengikuti Rapat Pimpinan dan Pembekalan Go Vote.

Dokumentasi pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU yang diikuti oleh pimpinan dan jajaran sekretariat, dalam rangka penguatan kapasitas SDM serta sinkronisasi kebijakan dan program kerja.

7. Terlaksananya Kegiatan Pendataan DPT Berkelanjutan (3360.EBA.994.002.OE)

Tabel 25. Alkoasi dan realisasi Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU
(3360.EBA.994.002.0D)

No.	Kegiatan	Target (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
7.	Pendataan DPT Berkelanjutan (3360.EBA.994.002.OE)	100%	Rp. 50,570,000	Rp. 50,570,000	100%	Berhasil

Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dengan target 100% terealisasi 100% dari total pagu yang dianggarkan Rp. 50,570,000- terealisasi Rp. 50,570,000,- Kegiatan Pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Berkelanjutan, berdasarkan realisasi sampai 31 Desember 2025 terealisasikan secara optimal sebesar 100% termasuk kategori BERHASIL, sehingga kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.

Dokumentasi kegiatan Pendataan DPT Berkelanjutan yang dilakukan secara periodik melalui rapat koordinasi dan pemutakhiran data pemilih guna menjaga akurasi dan validitas data pemilih.

8. Terlaksananya Kegiatan Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip (3360.EBA.994.002.LC)

Tabel 26. Alkoasi dan realisasi Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU
(3360.EBA.994.002.0D)

No.	Kegiatan	Target (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
8.	Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip (3360.EBA.994.002.LC)	100%	Rp. 6,320,000	Rp. 6,319,500	99.99%	Berhasil

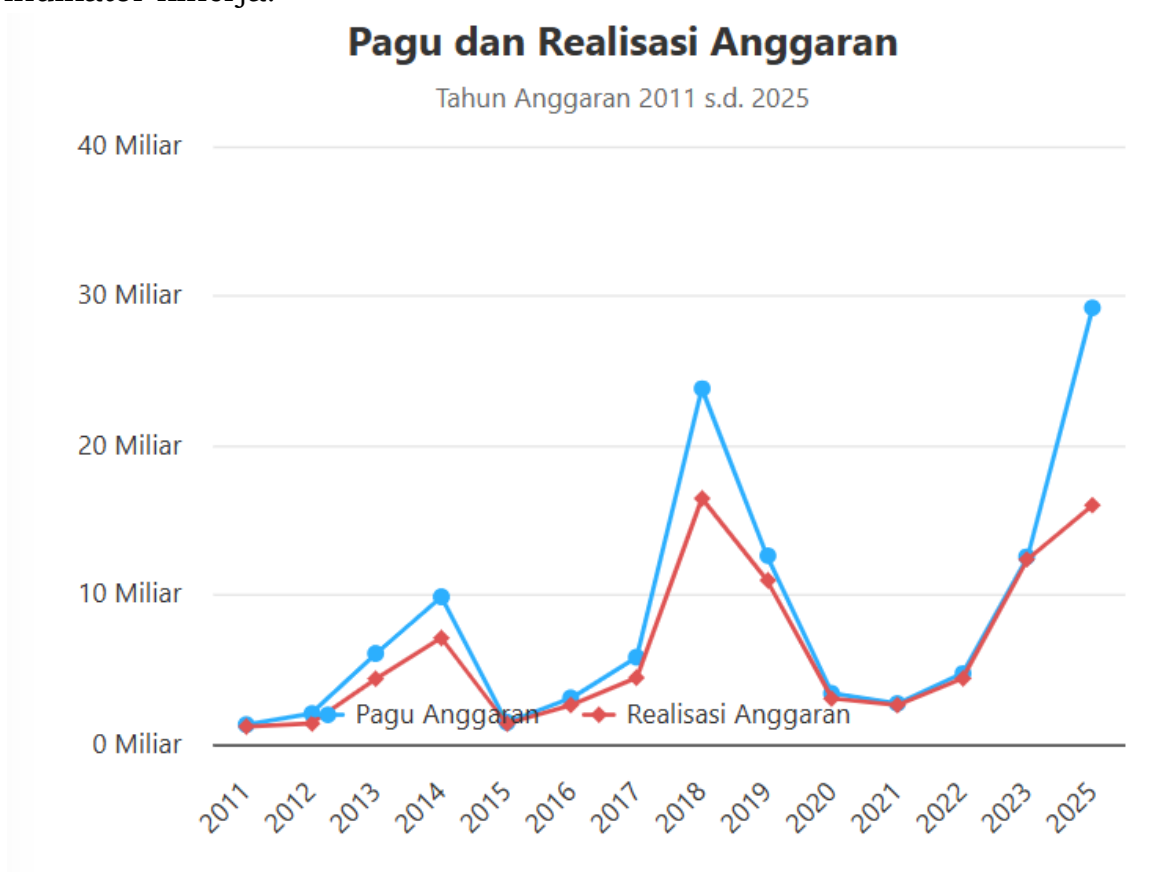
Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dengan target 100% terealisasi 100% dari total pagu yang dianggarkan Rp. 50,570,000- terealisasi Rp. 50,570,000,- Kegiatan Pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Berkelanjutan, berdasarkan realisasi sampai 31 Desember 2025 terealisasikan secara optimal sebesar 100% termasuk kategori BERHASIL, sehingga kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.

9. Tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana Internal (3360.EBB.961.LC)

Tabel 27. Alkoasi dan realisasi Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU
(3360.EBA.994.002.0D)

No.	Kegiatan	Target (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
9.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (3360.EBB.951.A)	100%	Rp. 37,139,000	Rp. 37,138,500	100%	Berhasil

Terlaksananya kegiatan layanan sarana dan prasarana internal dengan target 100% terealisasi 99,65% dari total pagu yang dianggarkan Rp. 37,269,000- terealisasi Rp. 37,138,500,- Kegiatan layanan sarana dan prasarana internal, berdasarkan realisasi sampai 31 Desember 2025 terealisasi secara optimal sebesar 99,65% termasuk kategori BERHASIL, sehingga kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.

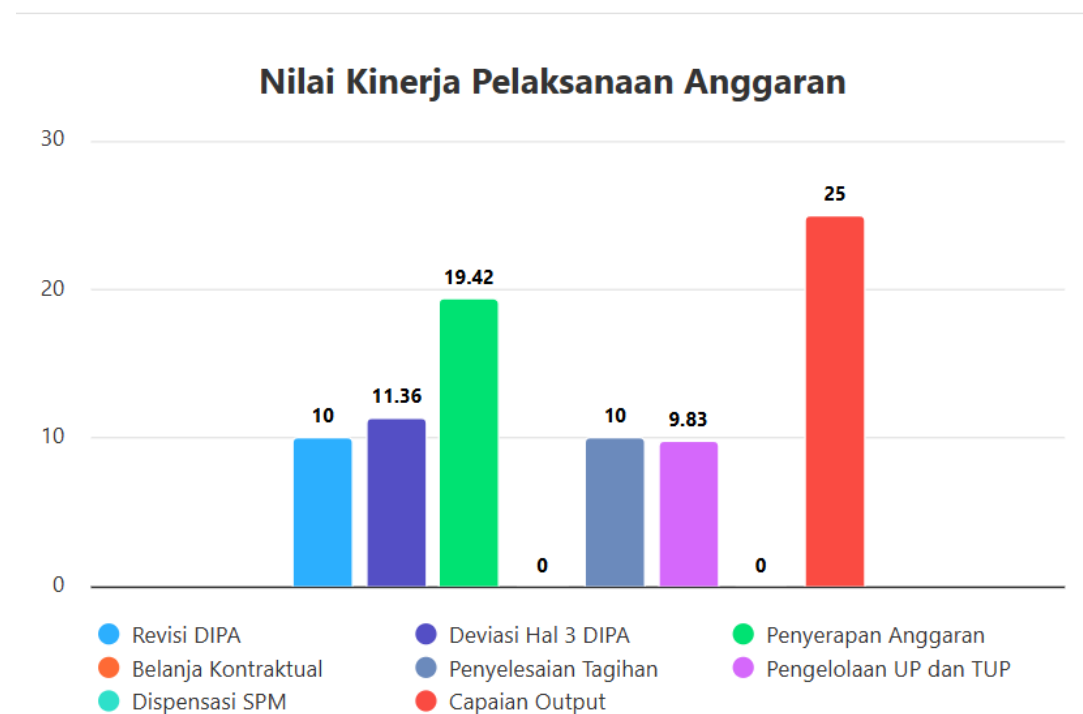


Gambar 17. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2011 s.d 2025,
Sumber Monev Kemenkeu 2025



"Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi"

Gambar 18. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran, Sumber Monev Kemenkeu 2025



Gambar 19. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Sumber Monev Kemenkeu 2025

2. Perbandingan Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2024, KPU Kota Bima mengelola pagu anggaran yang jauh lebih besar, yaitu Rp25.003.970.474,00. Realisasi anggaran tercatat hampir sepenuhnya terserap dengan capaian 99,81%. Tingkat penyerapan yang sangat tinggi ini menunjukkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tahapan strategis Pemilu.

Sementara itu, pada Tahun Anggaran 2025, meskipun pagu anggaran mengalami penurunan menjadi Rp5.319.568.000,00, realisasi anggaran tetap menunjukkan kinerja yang sangat optimal, yaitu sebesar Rp5.318.811.891,00 atau dengan tingkat penyerapan 99,99%. Hal ini menegaskan konsistensi KPU Kota Bima dalam menjaga kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran meskipun dalam kondisi anggaran yang lebih terbatas.

Secara keseluruhan, perbandingan menunjukkan bahwa KPU Kota Bima mampu mengelola pagu anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel, dengan tingkat penyerapan anggaran yang cenderung meningkat dan berada pada kategori sangat tinggi. Kondisi ini mencerminkan dukungan manajemen anggaran yang baik terhadap pencapaian kinerja organisasi dan pelaksanaan tugas kelembagaan KPU Kota Bima.

Perbandingan realisasi KPU Kota Bima selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir :

Tabel 28. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran

NO.	TAHUN ANGGARAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	2022	Rp. 4,748,570,000,-	Rp. 4,412,160,699,-	92.92%
2	2023	Rp. 12,584,441,000,-	Rp. 12,367,350,792,-	98.27%
3	2024	Rp. 25,003,970,474,-	Rp. 25,003,970,474,-	99.81%
4	2025	Rp. 5,319,568,000,-	Rp. 5,318,811,891,-	99.99%

Prosentase realisasi anggaran tahun 2025 lebih tinggi dari realisasi anggaran tahun 2025 hal ini disebabkan antara lain :

- Pada tahun Anggaran 2025 KPU Kota Bima dapat melaksanakan kegiatan sesuai ketersediaan anggaran yang ada dan hampir terserap semua.
- Pada Tahun Anggaran 2025 KPU Kota Bima sebagian besar anggaran yang tersedia untuk program dukungan manajemen .

- c. Maksimalisasi pelaksanaan anggaran didukung oleh komunikasi dan koordinasi antara komisioner dan sekretariat dan antara sekretaris dengan subbagian, sehingga integrasi informasi akan mempengaruhi ketepatan dan kecepatan dalam pengambilan keputusan.
- d. Dalam pelaksanaan anggaran pada Tahun 2025 kami sangat mengedepankan unsur kehati-hatian yang berazaskan pada efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas. Sehingga kami berharap seluruh anggaran dilaksanakan dengan sukses, yaitu sukses Tahapan, sukses administrasi dan sukses laporannya.
- e. Maksimalisasi pelaksanaan anggaran juga harus didukung oleh komunikasi dan koordinasi antara komisioner dan sekretariat dan antara sekretaris dengan subbagian, sehingga integrasi informasi akan mempengaruhi ketepatan dan kecepatan dalam pengambilan keputusan.

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 29. Rekap Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA %	REALISASI %	TINGKAT EFISIENSI
I	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)						
1	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Prosentase Penyusunan Program, Kegiatan, dan Anggaran KPU, Pengelolaan Revisi Anggaran, Kajian/Analisa, Prosedur dan Mekanisme Penganggaran	-	-	-	-	-
2	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025	Prosentase Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025	Rp. 50,570,000	Rp.50,570,000	100%	100%	100%
3	Terfasilitasinya Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Prosentase Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	-	-	-	-	-
		Prosentase Pemutakhiran Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) tahun 2025	-	-	-	-	-
		Prosentase Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Rp.9,380,000	Rp.9,380,000	100%	100%	100%
		Prosentase Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Rp.20,808,000	Rp.20,806,000	99,99%	99,99%	99%
		Prosentase Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDIH)	-	-	-	-	-
		Prosentase Pelaksanaan Pengendalian Sengketa Pemilihan 2024	-	-	-	-	-

		Prosentase Pelaksanaan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan 2024	-	-	-	-	-
4	Terwujudnya Kegiatan Pemilih Kepemiluan Demokrasi	Prosentase Evaluasi Badan Adhock Pemilihan Serentak Tahun 2024	-				
		Sosialisasi Pendidikan Pemilih Desa bebas Money Politik dan Desa Demokrasi	Rp.6,000,000	Rp.5,999,500	99,99%	99,99%	99%
		Prosentase Pengelolaan JDIH KPU Kota Bima	-	-	-	-	-
		Prosentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Rp.6,320,000	Rp.6,319,500	99,99%	99,99%	99%
5	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan barang milik Negara	Prosentase Layanan Gaji dan Tunjangan	Rp.3.413.436.000	3,767,920,978	99,97%	99,97%	99,97%
6	Meningkatnya kualitas layanan operasional perkantoran dan dukungan sarana prasarana.	Prosentase Layanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp. 213,993,000	Rp. 213,993,000	100%	100%	100%

3. Analisa Keuangan

KPU Kota Bima memiliki DIPA dengan Pagu sebesar Rp. 5,319,568,000,- (Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang berasal dari APBN berdasarkan Revisi ke 21 (dua puluh satu) DIPA KPU Kota Bima Nomor : SP DIPA-076.01.2.658262/2025 Tanggal 19 Januari 2026;

Pada tahun 2025, prosentase penyerapan anggaran yang berasal dari APBN murni adalah sebesar adalah sebesar :

Pagu : Rp 5,319,568,000,-

Realisasi : Rp 5,318,811,891,-

Penyerapan : (Realisasi/Pagu) x 100 % = 99,99%

Rincian anggaran belanja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bima pada Tahun Anggaran 2025 dapat dirinci sesuai tabel dibawah ini:

Tabel 30. Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2025

No.	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan (6639)	1,206,126,000	1,206,124,807
2	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)	4,113,442,000	4,112,687,084
3	Terfasilitasinya layanan operasional perkantoran (3360.EBA.994.002 OA)	213,993,000	213,982,606
4	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih (3360.EBA.994.002 OB)	6,000,000	5, 999,500
5	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi PAW (3360.EBA.994.002 OC)	9,380,000	9,380,000
6	Terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi SDM KPU (3360.EBA.994.002 OD)	20,808,000	20,806,000

7	Terlaksananya Kegiatan Pendataan DPT Berkelanjutan (3360.EBA.994.002 OE)	50,570,000	50,570,000
8	Terlaksananya kegiatan Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip (3360.EBA.994.002 LC)	6,320,000	6,319,500
9	Tersedianya Layanan Sarana dan Prasanara Internal (3360.EBB.961. LC)	37,269,000	37,138,500
Total		5,319,568,000	5,318,811,891

C. INOVASI

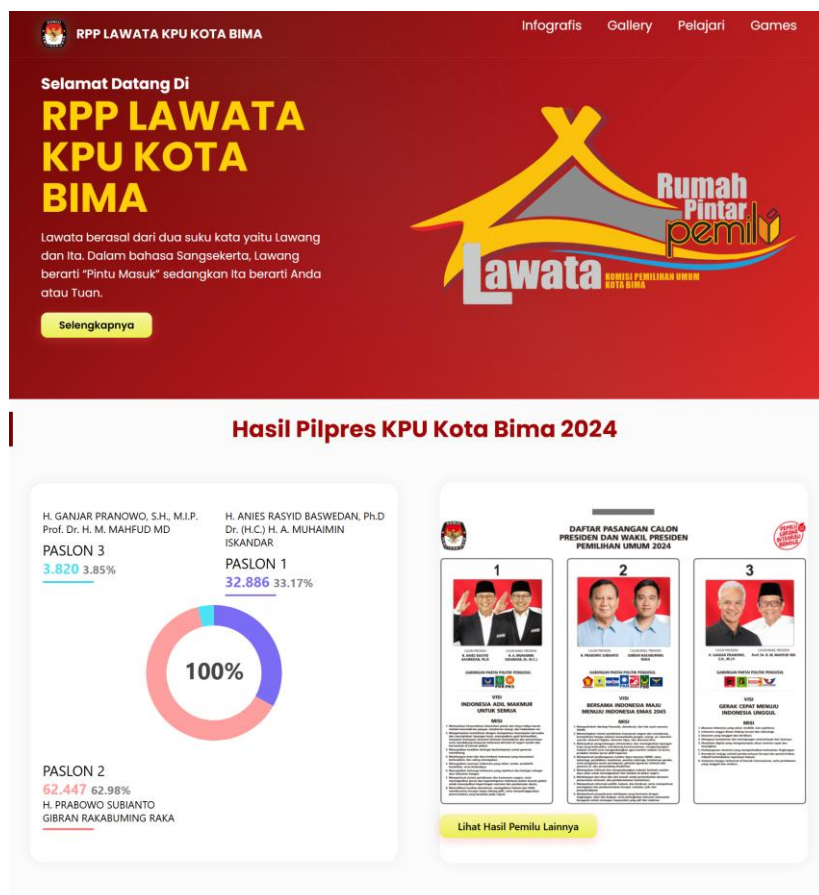
RPP LAWATA KPU KOTA BIMA (Rumah Pintar Pemilu Lawata)

RPP LAWATA KPU KOTA BIMA merupakan inovasi yang dikembangkan oleh KPU Kota Bima sebagai pusat edukasi dan literasi kepemiluan bagi masyarakat. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai demokrasi, hak dan kewajiban pemilih, serta peran strategis warga negara dalam setiap tahapan pemilu dan pemilihan. Kehadiran RPP Lawata, yang didukung oleh platform digital rpplawata.kpukobi.com, diharapkan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas, khususnya generasi muda yang akrab dengan teknologi informasi.

Melalui RPP Lawata, KPU Kota Bima menyajikan berbagai materi edukasi kepemiluan secara sederhana, informatif, dan mudah dipahami, mulai dari pengenalan pemilu, sejarah dan regulasi kepemiluan, hingga tata cara penggunaan hak pilih. Materi yang disusun disesuaikan dengan karakteristik pemilih pemula, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum, sehingga menjadi sarana pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan literasi politik serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi.

Selain berfungsi sebagai sarana edukasi dan informasi, RPP Lawata juga mengusung konsep rekreasi-edukasi, yaitu pembelajaran kepemiluan yang interaktif dan menyenangkan. Dengan filosofi nama “Lawata” yang melambangkan keterbukaan dan kebersamaan, RPP Lawata menjadi ruang belajar demokrasi yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, guna mendorong terwujudnya pemilih yang

cerdas, aktif, dan bertanggung jawab. RPP Lawata KPU Kota Bima dapat di akses melalui url berikut: <https://rpplawata.kpukobi.com/>



Gambar 20. Tangkapan Layara Website RPP Lawata

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai implementasi dari pelaksanaan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang merupakan rangkaian kegiatan dan kinerja sepanjang Tahun 2025 berbasis anggaran. Capaian Kinerja secara keseluruhan dari Program dan kegiatan telah tercapai 99,99%, sedangkan dari alokasi anggaran sebesar Rp 5.319.568.000,- sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : SP DIPA- 076.01.2.658262/2025 tanggal 19 Januari 2026. Ada dua program kegiatan besar yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum di Tahun Anggaran 2025 ini, yaitu Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan Program Dukungan Manajemen.

Seluruh capaian kinerja tersebut diatas, baik Program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi nasional merupakan program dukungan kegiatan teknis KPU yang sebagian besar diatur melalui Tahapan Pemilu dengan sasaran program yang hendak dicapai adalah :

Terlaksananya Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

Program dukungan manajemen merupakan program generik KPU dengan sasaran program, yaitu :

1. Terfasilitasinya Operasional Perkantoran.
2. Terlaksananya Sosialisasi Pendidikan Pemilih
3. Terlaksananya Sosialisasi PAW.
4. Terlaksananya Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU.
5. Terlaksananya Pendataan DPT Berkelanjutan.
6. Terlaksananya Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip.

Alokasi Anggaran Program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi nasional sebesar Rp. 1,206,126,000 ,- realisasi sebesar Rp. 1,206,124,807 ,- Saldo anggaran Rp. 1,193,- dengan persentase pelaksanaan anggaran sebesar 100 % sedangkan alokasi anggaran program dukungan manajemen sebesar Rp. 4,113,442,000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4,112,687,084,- dengan prosentase pelaksanaan sebesar Rp. 99,98 %.

Dengan demikian maka total dari seluruh pelaksanaan anggaran KPU Kota Bima sebesar 99,99% dari pagu Rp. 5,319,568,000,- artinya

ada pergerakan realisasi anggaran sebesar Rp. 5,318,811,891,- Hal ini termuat dalam Laporan Ketersediaan Dana Detail TA. 2025 Per Program, Keiatan, Output, Sub Output, Komponen, Sub Komponen dan Akun Periode Desember 2025.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan prosentase pelaksanaan anggaran sebagaimana yang telah diuraikan pada kesimpulan di atas, laporan ini sesungguhnya tingkat kinerja mencapai 100% dan serapan anggaran KPU Kota Bima 100 % tersebut sudah melebihi dari target nasional yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 100%, maka yang menjadi rekomendasi untuk mempertahankan atau meningkatkan Realisasi antara lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan koordinasi dan komunikasi yang baik antara komisioner dan sekretariat dalam merencanakan pelaksanaan, melaksanakan dan pengevaluasi pelaksanaan anggaran.
2. Peningkatan kapasitas SDM harus menjadi prioritas utama dalam rangka terwujudnya kualitas dan kompetensi SDM.
3. Perlu menyusun acuan kerja dan rencana anggaran Biaya untuk masing-masing program kegiatan dengan mengaktifkan perencanaan di masing-masing sub bagian.

C. RENCANA TINDAK LANJUT

Memperhatikan hasil analisis capaian kinerja sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum pada Tahun berikutnya yaitu sebagai berikut:

4. Meninjaklanjuti surat Sekretaris Jendral KPU RI Nomor 163/PW.02-LP/12/2025 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi NTB Tahun 2024.
5. Melaksanakan evaluasi internal untuk meningkatkan implementasi SAKIP pada KPU Kota Bima
6. Berkoordinasi dan bekerjasama secara berkesinambungan/berkelanjutan dengan instansi terkait;
7. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat,
8. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang telah berkompeten dalam bidang keuangan dan teknologi informasi
9. Pemanfaatan teknologi informasi yang lebih luas dan terintegrasi perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk Pemilu dan Pemilihan yang akan datang.

Tabel 31. Pengukuran Kinerja KPU Kota Bima Tahun 2025

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	%
1	Program 076.01.CQ – Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1.206.126.000	1.206.124.807	100,00	100%	100%	100%
	Sasaran Program: Terwujudnya pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan						
	Indikator Kinerja Program: Persentase tahapan Pemilu/Pemilihan terlaksana sesuai peraturan						
	Kegiatan 6639 – Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	1.206.126.000	1.206.124.807	100,00	100%	100%	100%
2	Program 076.01.WA – Dukungan Manajemen	4.113.442.000	4.112.687.084	99,98	100%	100%	100%
	Sasaran Program: Terselenggaranya dukungan manajemen yang efektif dan akuntabel						
	Indikator Kinerja Program: Persentase layanan manajemen yang terlaksana tepat waktu						
	Kegiatan 3355 – Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	3.769.232.000	3.767.920.978	99,97	100%	100%	100%
	EBA.994 Layanan Perkantoran	3,769,232,000	3,767,920,978	99,97	100%	100%	100%
	001 Gaji dan Tunjangan	3,769,232,000	3,767,920,978	99,97	100%	100%	100%
	001.0A Gaji dan Tunjangan	1,825,218,000	1,824,255,439	99.95	100%	100%	100%
	001.0B Uang Kehormatan	845,345,000	845,344,500	100	100%	100%	100%
	001.0C Gaji dan Tunjangan PPPK	1,046,330,000	1,046,318,513	100	100%	100%	100%
	001.0D Gaji dan Tunjangan PPPK TAHAP 2	52,339,000	52,002,526	99.36	100%	100%	100%

Kegiatan 3360 – Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	344.210.000	344.766.106	100	100%	100%	100%
EBA.994 Layanan Perkantoran	307,071,000	307,627,606	100	100%	100%	100%
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	307,071,000	307,627,606	100	100%	100%	100%
002.0A Operasional Kantor	213,993,000	214,552,606	100	100%	100%	100%
002.0B Sosialisasi Pendidikan Pemilih	6,000,000	5,999,500	99.99	100%	100%	100%
002.0C Sosialisasi PAW	9,380,000	9,380,000	100	100%	100%	100%
002.0D Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU	20,808,000	20,806,000	99.99	100%	100%	100%
002.0E Pendataan DPT Berkelanjutan	50,570,000	50,570,000	100	100%	100%	100%
002.LC Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	6,320,000	6,319,500	99.99	100%	100%	100%
EBB.951 Layanan Sarana Internal	37,139,000	37,138,500	100	100%	100%	100%
052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi						
052.0A SARANA DAN PRASARANA	37,139,000	37,138,500	100	100%	100%	100%
JUMLAH	5.319.568.000	5.318.811.891	99,99	100%	100%	100%

LAMPIRAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suaeb

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kota Bima, 21 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada	Indeks Pelayanan Publik	85%
		Persentase Anggota DPRD Kota Bima yang Melaksanakan PAW	100%
2.	Tersedianya Data Pemilih dan Peserta Pemilu sesuai Ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Terdata, Akurat dan Komprehensif	100%
3.	Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada	Persentase Jumlah Partisipasi Pemilih pada Pemilu	88,30%
		Persentase Jumlah Partisipasi Pemilih pada Pilkada	84,52%
5.	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana dan Prasarana Kinerja yang Memadai	Tersedia Sarana dan Prasarana dengan Baik serta Fasilitas Perkantoran di KPU Kota Bima	100%
		Nilai SAKIP KPU Kota Bima	BB
		Dukungan Pencapaian Opini BPK atas Laporan Keuangan Kota Bima	100%
		Indeks Pengelolaan Aset	100%
		Tingkat Digitalisasi Arsip	100%
		Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU	100%
		Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 (3,1)
		Pengelolaan JDIH	100%
		Persentase Jumlah Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan	100%
		Digitalisasi Kepegawaiaan	100%
		Persentase Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang Terdokumentasikan	95%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Rp. 4.112.117.084,-
2.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Rp. 1.206.126.000,-
JUMLAH		Rp. 5.318.243.084,-

Kota Bima, 21 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BIMA,

SUAEB



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRHAM

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bima

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama : SUAEB

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, 21 Juli 2025

**PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA**



**PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KPU KOTA BIMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Layanan kepada Publik dengan Baik	Indeks Pelayanan Publik	100%
		Persentase Anggota DPRD Kota Bima yang Melaksanakan PAW	100%
2.	Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada	Persentase Jumlah Partisipasi Pemilih pada Pemilu	88,30%
		Persentase Jumlah Partisipasi Pemilih pada Pilkada	84,52%
3.	Tersediannya Data Pemilih yang Valid sesuai Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Data Pemilih yang ditetapkan KPU sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%
5.	Terwujudnya Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas, Fungsi dan Wewenang KPU Kota Bima	Tersedia Sarana dan Prasarana dengan Baik serta Fasilitas Perkantoran di KPU Kota Bima	100%
6.	Pengelolaan Arsip KPU Kota Bima	Tingkat Digitalisasi Arsip	90%
7.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang Berlaku	Indeks Pengelolaan Aset	90%
8.	Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran yang Efektif dan Efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja yang Telah Ditetapkan	10 kali
9.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kota Bima	Dukungan Pencapaian Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kota Bima	100%
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90%
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Bima	BB
10.	Terlaksananya Program Reformasi Birokrasi sesuai Ketentuan yang Berlaku	Indeks Reformasi Birokrasi	85%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
11.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Jumlah Pegawai yang memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan	100%
		Digitalisasi Kepegawaian	100%
		Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 (3,1)
12.	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel	Pengelolaan JDIH	100%
		Persentase Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang Terdokumentasikan	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Rp. 4.112.117.084,-
2.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Rp. 1.206.126.000,-
JUMLAH		Rp. 5.318.243.084,-

Kota Bima, 21 Juli 2025

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA


SUEAB

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA


IRHAM